



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jl. Pulau Lepar No. 6, Komplek Perkantoran Pemprov. Kepulauan Bangka Belitung,  
Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang, Telp./Fax.(0717) 421743  
Web : kukm.babelprov.go.id Email : kukm@babelprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**NOMOR : 188.4/ 64 /DKUKM/2024**

**TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa setiap Badan Publik wajib mengumumkan informasi publik yang terdiri atas: a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan/atau c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri A);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 Seri D).
18. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/287/Diskominfo/2022 tentang Penunjukan Pengelola Layanan

Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka  
Belitung.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik untuk diakses di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana tersebut dalam lampiran.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 30 Mei 2024

**Pt. KEPALA DINAS,**



**RIZA ARYANI, S.Sos., M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19750130 200212 2 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
2. PPID Utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Arsip

**LAMPIRAN**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA DAN BELITUNG

NOMOR : 188.4164 /KUKM/2024

TANGGAL : 30 Mei 2024

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
 TAHUN 2024**

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA								
No.	RINGKASAN ISI INFORMASI	UNIT KERJA YANG Menguasai	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBIT INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			RETENSI ARSIP
					CETAK	REKAM	ONLINE	
1	Informasi tentang Profil Badan Publik							
a.	Kedudukan dan alamat lengkap Kantor Badan Publik	Kepala Subag Umum	Sekretaris	2024	√		√	Selama Berlaku
b.	Visi dan Misi	Kepala Subag Umum	Sekretaris	2024	√		√	Selama Berlaku
c.	Tugas dan fungsi	Kepala Subag Umum	Sekretaris	2024	√		√	Selama Berlaku
d.	Struktur Organisasi Serta Profil Singkat Pejabat Struktural.  Memuat Rincian Struktur Organisasi Dinas Koperasi UKM dan Jumlah SDM	Kepala Subag Umum	Sekretaris	2024	√		√	Selama Berlaku
2	Rencana Strategis Rencana strategis dan renja Dinas Koperasi dan UMKM	Kepala Subag Perencanaan	Sekretaris	2023	√		√	5 Tahun
	Rencana Kegiatan			2024	√		√	1 Tahun
3	LHKPN Pejabat yang diverifikasi	Kepala Subag Umum	Sekretaris	2024	√			Selama Berlaku

	LHKPN Pejabat Struktural pada Dinas Koperasi UKM							
4.	Ringkasan Program & Kegiatan yang sedang dijalankan							
a.	Nama Program Prioritas  Ringkasan Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah	Kepala Subag Perencanaan	Sekretaris	2024	√		√	1 Tahun
b.	Target Capaian Program dan Kegiatan	Kepala Subag Perencanaan	Sekretaris	2024	√		√	1 Tahun
c.	Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Kepala Subag Perencanaan	Sekretaris	2024	√		√	1 Tahun
d.	Kalender Pelatihan 2024	Kepala Seksi Penyelenggara Pelatihan	Kepala UPTD Balatkop UMKM	2024	√		√	1 Tahun
5	Informasi Laporan Akuntabilitas Kinerja							
a.	Bidang Kinerja  Ringkasan Informasi Kinerja Dinas Koperasi dan UKM -SAKIP -LAKIP	Kepala Subag Perencanaan	Sekretaris	2023	√		√	1 Tahun
b.	Laporan Layanan Informasi Publik  Ringkasan Laporan Permohonan Informasi Publik Tahun 2023	Kepala Subag Umum	Sekretaris	2023	√		√	1 Tahun
c.	Informasi Peraturan, Keputusan dan atau Ketetapan beserta Rancangannya yang mengikat Publik  Berisi Peraturan-peraturan tentang Koperasi dan UMKM	Masing-masing Bidang	Masing-masing Bidang	2023			√	Selama Berlaku
6.	Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa	Kepala Subag Umum	Sekretaris	2024			√	1 Tahun

	Ringkasan Paket-paket kegiatan APBD yang akan dilelangkan 2024							
7.	Data Keragaan Koperasi di Wilayah Provinsi Kep Bangka Belitung  Informasi Keragaan Koperasi lingkup Provinsi Kep Bangka Belitung dengan rincian Jumlah total koperasi, jumlah koperasi aktif dan tidak aktif, dan jumlah anggota koperasi di Provinsi Kep Bangka Belitung	Sub Koordinator Kelembagaan	Bidang Koperasi	2023	√		√	1 tahun
8.	Data Jumlah UMKM di Provinsi Kep Bangka Belitung  Informasi Jumlah UMKM di Provinsi Kep Bangka Belitung berdasarkan Kab/Kota dan skala usahanya	Sub Koordinator Data dan Penguatan Kelembagaan	Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	2023	√		√	1 tahun
9.	Data Jumlah Peserta Pelatihan  Rekapitulasi jumlah peserta pelatihan -Koperasi -UMKM	Kepala Seksi Penyelenggara Pelatihan	Kepala UPTD Balatkop UMKM	2023	√		√	1 Tahun
10..	Ringkasan Laporan Keuangan							
a.	Laporan Realisasi Anggaran 2023 Realisasi Anggaran yang berakhir di Tahun 2023 dengan rincian dana anggaran dan realisasi anggaran	Kepala Subag Umum	Sekretaris	2023			√	1 Tahun
b.	Daftar Aset dan Inventarisasi  Rekap Aset Inventarisasi Tahun 2023 dengan rincian : - tanah - peralatan dan mesin - gedung dan bangunan	Kepala Subag Umum	Sekretaris	2023			√	1 Tahun

- jalan, irigasi dan jaringan
- aset tetap lainnya

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SETIAP SAAT								
No.	RINGKASAN ISI INFORMASI	UNIT KERJA YANG Menguasai	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBIT INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			RETENSI ARSIP
					CETAK	REKAM	ONLINE	
1.	Daftar Informasi Publik (DIP)  Berisi informasi Daftar Informasi tahun 2024 yang diumumkan secara berkala, setiap saat dan informasi serta merta	Kepala Subag Umum	Sekretaris	2024	√		√	Selama Berlaku
2.	Kebijakan Badan Publik  Informasi Tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik	Kepala Subag Umum	Sekretaris	2023	√		√	Selama Berlaku
3.	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik sesuai ketentuan KIP  Berisi tentang : 1. Mekanisme Permohonan Informasi Publik 2. Form permohonan informasi publik 3. Progress permohonan 4. Mekanisme Keberatan Informasi Publik	Kepala Subag Umum	Sekretaris	2021	√		√	Selama Berlaku
4.	S O P Layanan PPID Pelaksana  Standart Operasional Prosedur tentang pelayanan Informasi Publik yang di sahkan oleh Kepala Dinas Koperasi UKM	PPID Pembantu	Sekretaris	2021	√		√	Selama Berlaku
5.	S O P di Dinas Koperasi dan UKM	Masing-masing Bidang	Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala UPT Bsatkop	2024	√		√	Selama Berlaku

Standart Operasional Prosedur tentang pelaksanaan kegiatan dan tugas yang di sahkan oleh Kepala Dinas Koperasi UKM	UMKM					
--	------	--	--	--	--	--

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA								
No.	RINGKASAN ISI INFORMASI	UNIT KERJA YANG Menguasai	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBIT INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			RETENSI ARSIP
					CETAK	REKAM	ONLINE	
1	Prosedur Peringatan Dini  Informasi tentang prosedur peringatan dini dan evakasi terhadap bencana	Kepala Subag Umum	Sekretaris	2022	√		√	Selama Berlaku

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN					
NO	RINGKASAN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
1.	Data Pribadi Pegawai	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	- Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan
2.	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf h	- Dapat menghambat proses penegakan hukum  - Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Memperlancar proses penegakan hukum  - Menjaga rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada keputusan tetap
3.	Data Hasil Check Up perorangan PNS/Pejabat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	- Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan
4.	Data Hasil Evaluasi kinerja PNS/Pejabat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	- Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan

5.	Daftar Nilai DP3 PNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Selama masih berlaku
6.	Keputusan ijin/keterangan tentang perceraian PNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin.
			- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan	
7.	Dokumen pengelolaan kepegawaian : (Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala,	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP,	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman
8.	Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	- Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	- Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Sampai diketahui pemenangnya
9.	Rincian Harga Perkisaran Sendiri (HPS)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	- Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	- Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Sampai diketahui pemenangnya
10.	Dokumen penawaran dari Penyedia Barang/Jasa	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Dapat menjamin obyektivitas penilaian/evaluasi penawaran	Selama proses pengadaan barang dan jasa

11.	Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Negara	- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1)	- Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	- Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan terbitnya Dok Pertanggungjawab Keuangan Negara yang telah diaudit
		- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j			
12.	Laporan Keuangan Daerah (laporan keuangan yang belum diaudit)	- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1)	- Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	- Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit
		- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j			

Ditetapkan di Pangkalpinang

Tanggal : 30 Mei 2024

Plt. Kepala

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



**RIZA ARYANI, S.Sos., M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19750130 200212 2 006